



INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI SISTEM TENAGA KERJA BERBASIS JARINGAN DI DINAS TENAGA KERJA KOTA TASIKMALAYA

Manarul Azmi Hidayah, Gili Argenti, Indra Aditya

Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Abstrak

Pada era globalisasi ini hampir semua bidang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dengan adanya kemajuan ini, pemerintah harus berlomba dalam inovasi-inovasi yang di berikan untuk pelayanan publik. Salah satu pelayanan publik yang tentunya membutuhkan inovasi adalah pelayanan publik terhadap pelayanan pencarian tenaga kerja. Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya berupaya membuat inovasi pelayanan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang baik dalam pecaaraan tenaga kerja. Inovasi yang diberikan ini dengan menggunakan sistem tenaga kerja berbasis jaringan diharapkan akan memudahkan para tenaga kerja dalam mendapatkan pekerjaan khususnya dalam pembuatan surat kuning AK.1. Tujuan Penelitian ini adalah untuk memeberikan gambaran bagaimana inovasi yang telah dilakukan oleh dinas tenaga kerja dalam pembuatan system berbasis jaringan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan penulis mendapatkan data buku-buku, literatur literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan berupa sarana dan prasarana yang lebih dioptimalkan kembali, pengawasan dan pelatihan bagi para pegawai. Hal tentunya dapat dimaksimalkan kembali sehingga pelayanan publik berbasis jaringan ini lebih baik.

Kata Kunci: Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, Tenaga Kerja.

PENDAHULUAN

Peran Pemerintah dalam Pelayanan publik tentunya sangat penting. Dalam pemerintah, terdapat Lembaga-lembaga Dinas Daerah, yang terbagai kedalam urusan-urusan salah satunya adalah pekerjaan umum. Disisi lain pemerintah memiliki Aparatur Pemerintahan Daerah yang bekerja untuk memenuhi pelayanan bagi masyarakat. Dan juga Kepemimpinan Pemerintahan Daerah yang harus dimiliki oleh setiap aparatur pemerintahan daerah. Setiap Kepala daerah tentunya memiliki kewenangan yang dimanfaatkan untuk memajukan daerah yang dipimpinnya. Mengingat yang dimaksud dalam pasal 11 salah satu urusan pemerintah wajib adalah tenaga kerja.

Pemerintah merupakan sebuah lembaga yang dimana salah satu tugasnya sebagai pemberi pelayanan terhadap masyarakat. Dalam merelisasikannya, pemerintah memberikan beberapa pelayanan publik bagi seluruh masyarakat. Pelayanan publik ini merupakan hal yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga keberadaan lembaga pemerintah tidak hanya soal nama melainkan terdapat kinerja dan dedikasinya terhadap masyarakat. Pelayanan publik harus mendapatkan inovasi yang lebih baik dari sebelumnya. Karena dengan adanya keluhan dari masyarakat, hal ini menuntut kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah masih belum cukup baik.

Dalam keputusan Menpan No. 63/Kep/M.PAN/7/2003 dimana penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewajiban aparatur pemerintah. Disebutkan juga bahwa pengertian pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, instansi pemerintah

dan badan hukum maupun sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah pada masa era globalisasi ini, dituntut untuk lebih memberikan kreatifitas inovasi terhadap pelayanan yang akan diberikan. Tujuannya adalah agar semakin dekat dengan masyarakat dan juga memberikan pelayanan yang semakin lebih baik.

Peningkatan pelayanan publik yang diberikan, turut serta membantu dalam mencapai tujuan pembangunan. Begitu pula dalam urusan tenaga kerja. Tenaga Kerja sebagai sumber daya manusia yang memiliki kepentingan kedudukan serta peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan. (Armstrong & Taylor, 2014; GutierrezGutierrez, Barrales-Molina, & Kaynak, 2018; Mostafa, Gould-Williams, & Bottomley, 2015). Pelayanan pencarian tenaga kerja yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kepada masyarakat selaku sumber daya manusia bagi tenaga kerja harus baik dan juga berkualitas. Dengan adanya pelayanan yang baik diharapkan akan tercipta pula tenaga kerja yang baik dan berkualitas yang dapat mencapai tujuan pembangunan.

Pemerintah Tasikmalaya telah membuat sebuah inovasi dalam pelayanan bagi para tenaga kerja yaitu SINETAR BASAJAN.

Dalam pengimplementasiannya, pemerintah daerah Tasikmalaya tentunya membutuhkan jaringan internet agar hal ini dapat terlaksana. Penggunaan jaringan internet tentunya sudah sangat diperlukan dalam membuat dan menjalankan inovasi terhadap kebijakan pelayanan yang akan dilakukan. Inovasi pelayanan publik dengan teknologi ini tentunya dapat memberikan efek yang baik terhadap pelayanan publik yang disediakan.

Tentunya hal ini sangat berguna, karena pada awalnya pelayanan dalam

pencarian tenaga kerja belum tersedianya layanan online. Dan juga mengingat jumlah angka tenaga kerja yang masih belum sebanding dengan lapangan pekerjaan. Tidak hanya mengenai jumlah angka tenaga kerja, permasalahan yang terjadi seperti rendahnya daya saing masyarakat dari segi keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan.

METODE PENELITIAN

Menurut Priyono (2016:1) metode penelitian merupakan suatu cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Berbeda dengan Priyono, Subagyo dalam Bahari dan Zam-Zam (2015:3) menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali suatu pemecahan terhadap berbagai permasalahan yang diajukan. Dari dua pendapat ahli mengenai metode penelitian dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dan mendapatkan jawaban yang menjadi tujuan.

Metode Penliataian yang di gunakan dalam penelitian kali ini merupakan metode studi kepustakaan. Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul "Metode Penelitian" mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Studi Kepustakaan/Literatur merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Selanjutnya menurut Nazir (2014 : 27) studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Sedangkan menurut Zed (2014:3) studi

pustaka atau studi literatur merupakan kegiatan yan berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi Literatur pada penelitian kali ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari literatur maupun referensi-referensi yang ada. Penulis melakukan studi literatur pada jurnal, penelitian dan referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan Inovasi Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Tenaga Kerja Berbasis Jaringan (SINETAR BASAJAN)

Sistem Tenaga Kerja Berbasis Jaringan ini merupakan salah satu inovasi yang di lakukan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya, khususnya Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya untuk mempermudah para pencari kerja di daerah Tasikmalaya. Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) adalah sebuah instansi atau lembaga yang bertanggungjawab sebagai membina, mengendalikan dan pengawasan dalam bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah tersebut, kemudian dijabarkan oleh Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Unit Dinas Tenaga Kerja Kota Tasimalaya.

Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya memiliki beberapa bagian yang didalam lembaganya, yaitu :

1. Kepala Dinas,
2. Sekertariat,
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan

Keuangan,

5. Bidang Pelatihan, Prokduktivitas, Penempatan Tanaga Kerja
6. Seksi Pelatihan dan Prokduktivitas Tenaga Kerja,
7. Seksi Penempatan Teanaga Kerja dan Transmigrasi,
8. Bidang Pembinaan Hubungan Insudtrial dan Jaminan Sosisal Tenaga Kerja.
9. Seksi Hubungan Industrial dan Pelayanan Perselisihan.
10. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Setiap bagian-bagian yang ada didalam lembaga Dinas Tenaga Keja Kota Tasikmalaya memiliki tugas pokok dan fungsingnya masing-masing. Hal ini tertuang dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Unit Dinas Tenaga Kerja Kota Tasimalaya.

Pengertian secara umum fungsi Kartu Kuning yang memiliki sebutan resmi sebagai Kartu Tanda Pencari Kerja atau Kartu AK-1 adalah sebagai bukti diri seorang pelamar pekerjaan dalam melakukan pelamaran kerja pada suatu instansi atau perusahaan di Indonesia. Adapun Persyaratan pembuatan AK-1 adalah :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau foto copy KTP yang dilegalisir
- b. Ijasah terakhir asli atau foto copy yang dilegalisir
- c. Pas photo Hitam putih atau berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar
- d. Surat Keterangan Pengalaman kerja bila ada



Gambar 1.1 Alur Pendaftaran online AK.1 Kota Tasikmalaya

Sumber Gambar : Website Disnaker Kota Tasikmalaya

Inovasi merupakan suatu ide atau gagasan baru yang di dapat memberikan manfaat yang lebih daripada sebelumnya. Inovasi yang di lakukan pemerintah Tasikmalaya dengan memanfaatkan media jaringan ataupun teknologi ini, penulis berpendapat bahwa inovasi yang di buat merupakan hal yang baik. Penerapan Sistem Tenaga Kerja Berbasis Jaringan (SINETAR BASAJAN) ini merupakan upa pemerinta Tasikmalaya untuk meningkatkan pelayan bagi para tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan. Dalam pembuatan sebuah inovasi dalam sebuah pelayanan, tentu terdapat proses yang harus di lalui. Yaitu:

1. Rapat Penggagas Inovasi
2. Informasi akan di adakannya Duta Ketenagakerjaan
3. Pemilihan Duta Ketenagakerjaan
4. Pembangunan Sistem Informasi
5. Sosialisasi dan Launching
6. Pelaksanaan

Tapi, masih terdapat permasalahan yang terdapat, Yang pertama Kurangnya informasi lowongan kerja dari setiap perusahaan Yang kedua Kendala yang dihadapi saat ini adalah para pencari kerja belum dapat melaporkan bahwa pencari kerja sudah mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu 6 bulan setelah pencari kerja

membuat AK-1 ataupun memperpanjang AK 1, yang ke tiga lemahnya pelaporan penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada persentase angka pengangguran di Kota Tasikmalaya meningkat. Selain permasalahan diatas permasalahan pengawasan menjadi factor yang harus di perhatikan. Pengawasan ini mengacu kepada jumlah tenaga pengawas sehingga akan memaksimalkan pengawasan yang dilakukan.

Hal ini tidak semata-mata di pikirkan untuk terlihat terdapt inovasi yang terjadi dalam pelayanan. Tentunya terdapat manfaat yang diharapkan dengan adanya penerapan inovasi dalam pelayanan publik ini. Selain untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pelayanan publik ni, terdapat manfaat yang lain dalam program SINETAR BASAJAN. Yaitu:

1. Para pencari kerja diharapkan agar melaporkan (wajib lapor) melalui sms sesuai format pelaporan, untuk pencari kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan agar pemerintah mengetahui jumlah persentase pengangguran ataupun yang sudah bekerja di Kota Tasikmalaya.
2. Perusahaan memberikan informasi kepada Dinas Tenaga Kerja untuk menginformasi lowongan kerja di perusahaan.
3. Perusahaan dapat diharapkan menginformasikan pekerja yang diterima berasal dari Kota Tasikmalaya. Dan Diharapkan setelah diadakannya Duta Ketenagakerjaan dapat mencari Informasi lowongan tenaga kerja baik Antar kerja local (AKAL), antar kerja

Daerah (AKAD) dan Antar kerja Negara (AKAN).

Dengan masih terdapatnya permasalahan, tentunya hal ini harus menjadi perhatian oleh pemerintah kota Tasikmalaya kedepannya. Hal ini sangat perlu di lakukan, karena Menurut BPS Tasikmalaya, jumlah usia produktif di Kota Tasikmalaya pada tahun 2015 terdapat 443.525 orang. Dan dengan angkatan kerja mencapai 840.747 orang. Dalam penilaian kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari segi Ketepatan waktu, Sarana dan Prasarana dalam menunjang suatu pelayanan publik dan Sikap Petugas terhadap masyarakat. Program SINETAR BASAJAN tentunya sangat berkaitan dengan ketepatan waktu. Ketepatan waktu yang di janjikan oleh pemberi pelayanan. Program inovasi ini haruslah memberikan ketepatan waktu yang cukup efisien dalam prosesnya.

Terutama dalam pembuatan AK.1 yang seharusnya dapat lebih cepat dari pada karena dengan sistem online ini. Sarana dan Prasana merupakan suatu hal yang mendukung terjadinya pelayanan, dan hal ini wajib untuk dipenuhi oleh penyedia pelayanan. Program inovasi SINETAR BASAJAN tentunya memiliki sarana dan prasana yang harus dipenuhi agar pelaksanaan pelayanan benar benar efektif. Salah satunya dalah akses internet yang harus memadai. Selain itu tenaga petugas dalam hal ini pun harus dapat menjadi perhatian. Petugas tentunya harus dapat memahami sistem yang digunakan. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas pengawasan yang adakan dilakukan.

SIMPULAN

Inovasi yang dilakukan pemerintah daerah Tasikmalaya dalam pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan pencarian tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja dapat dikatakan cukup baik namun masih memiliki kekurangan didalamnya.

Hal ini di buktikan dengan adanya inovasi penerapan Sistem Tenaga Kerja Berbasis Jaringan (SINETAR BASAJAN).

Dengan adanya inovasi ini tentunya akan mengalami perubahan dalam proses pelayanan publik yang di berikan dan tentunya ini akan membantu para tenaga kerja dalam mencari pekerjaan.

Pelayanan yang berkualitas harus diringi dengan adanya Ketepatan Waktu yang baik, Sarana dan Prasarana yang mendukung dan berkualitas, dan Sikap para petugas yang baik dan ramah. Dalam analisis ini penulis memberikan saran yang di lihat dari pada masih terdapat hambatan ataupun kekurangan yang dimiliki.

Baik dari informasi lowongan pekerjaan yang dapat lebih baik dan lebih detail dalam penginformasiannya. Selanjutnya dalam hal sarana dan prasarana ini harus dapat lebih baik dan dipastikan Kembali agar cukup dalam melakukan proses pelaksanaan. Dalam permasalahan pelaporan hal ini dapat melibatkan daripada pengawasan yang dilakukan oleh dinas tenaga kerjaitu sendiri.

Proses pelaporan tentunya akan dapat di awasi dengan baik jika pengawasan ini memiliki sumber daya yang bagus. Tentunya harus ada persiapan yang lebih baik dari pelatihan tentang sistem berbasis jaringan ini. Sehingga pengawasan yang dilakukan akan berjalan dengan optimal. Inovasi SINETAR BASAJAN ini harus tetap terus dimaksimalisasi dan melakukan inovasi yang lebih terhadap pelayanan publik lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BPS Kota Tasikmalaya. Diunduh dari: <https://tasikmalayakota.bps.go.id> tanggal 11 Mei 2020.

Daraba, Dahyar & Alim Bachri Subianto. 2018. Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dalam

Maningkatkan Kualitas Tenaga Kerja di Kota Makassar. Vol. 5, No.1.

Disnaker kota Tasikmalaya. Diunduh dari: <https://disnaker.tasikmalayakota.go.id/> tanggal 11 Mei 2020.

Huda, Khoiril. 2015. Kewenangan Kepala Daerah Dalam Melakukan Inovasi Pengembangan Kawasan Industri di Daerah. Vol. 3, NO. 1

Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (Kinigara). Diakses dari https://fokkasi.bandung.lan.go.id/v2/index.php?r=inovasi/edirektori&Inovasi_page=2 di akses pada 11 Mei 2020.

Karo-Karo, R., & IP, M. (2019). PERANAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Ilmiah "INTEGRITAS"* Vol, 4(1).

Keputusan Menpan No. 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Kerangka Teori Pelayan publik. Diunduh di: <http://digilib.unila.ac.id/2158/8/Bab%202.pdf> tanggal 11 Mei 2020.

Marom, Aufarul. 2015. Inovasi Birokrasi Pelayanan Publik Bidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Kudus. Vol. 1, No. 1.

Moh. Nazir. 2014. Metode Penelitian. Bogot: Ghalia Indonesia.

Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Tasimalaya 2017-2022. Diunduh di: <http://disnaker.tasikmalayakota.go.id/wpcontent/uploads/2018/09/2.RENCANASTRATEGIS-DINAS-TENAGA-KERJA-2017-20221.pdf> tanggal 10 Mei 2020.

Zed, Mestika. 2014. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.